

KEPATUHAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT SWASTA DAN PEMERINTAH TERHADAP STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study examines the administrative compliance of private and government hospitals with established health service standards. Compliance varies significantly, with government hospitals tending to be more compliant due to strict supervision and binding regulations, although there are still shortcomings in certain aspects. On the other hand, private hospitals demonstrate flexibility in implementing standards, but sometimes face obstacles such as business orientation, resource constraints, and management issues. Nevertheless, some private hospitals have successfully created service innovations that align with or even exceed established standards. To achieve optimal compliance in both types of hospitals, intensive supervision, continuous training, and synergy between the government, regulatory bodies, and hospitals are required. The results of this study are expected to encourage improvements in the quality of healthcare services in Indonesia.

Keywords: *Compliance, Administration, Private Hospitals, Government, Health Service Standards.*

Abstrak

Penelitian ini membahas kepatuhan administrasi rumah sakit swasta dan pemerintah terhadap standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Kepatuhan tersebut sangat bervariasi, di mana rumah sakit pemerintah cenderung lebih patuh karena pengawasan yang ketat dan regulasi yang mengikat, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek tertentu. Di sisi lain, rumah sakit swasta menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi standar, namun terkadang menghadapi kendala seperti orientasi bisnis, keterbatasan sumber daya, dan manajemen. Meskipun begitu, beberapa rumah sakit swasta berhasil menciptakan inovasi pelayanan yang selaras atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Untuk mencapai kepatuhan yang optimal di kedua jenis rumah sakit, diperlukan pengawasan intensif, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, serta pihak rumah sakit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan, Administrasi, Rumah Sakit Swasta, Pemerintah, Standar Pelayanan Kesehatan.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas pelayanan tidak hanya mencakup akses yang mudah dan terjangkau, tetapi juga pemenuhan standar keselamatan, efektivitas, dan efisiensi dalam berbagai aspek pelayanan medis. Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat dapat memperoleh penanganan yang tepat sesuai kebutuhan, sehingga mampu mencegah komplikasi penyakit, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup (Setyawan, 2018). Oleh karena itu, standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan, baik secara nasional maupun internasional, harus dijadikan pedoman utama bagi seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta dan pemerintah.

Rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi

kesehatan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, fasilitas, SDM, hingga prosedur operasional yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Di bidang administrasi, penerapan sistem manajemen yang tertib dan efisien menjadi landasan utama dalam proses operasional fasilitas kesehatan, termasuk pengelolaan data pasien dan proses klaim asuransi yang transparan (Siregar, 2020). Di sisi fasilitas, layanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti alat medis modern, lingkungan steril, dan ruang pelayanan yang nyaman. Semua ini bertujuan agar pasien menerima pengalaman yang optimal selama proses perawatan, baik dari segi kenyamanan maupun keamanan medis (Pramono, 2018).

Selain itu, standar juga menyoroti pentingnya keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, mulai dari tenaga medis, paramedis, hingga staf pendukung lainnya. Pelatihan terus-menerus dan sertifikasi keahlian menjadi kunci untuk memastikan profesionalisme para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya (Mahendra, 2015). Ditambah lagi, prosedur operasional yang diterapkan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku agar seluruh proses pelayanan berjalan dengan efisien dan aman. Ketika semua aspek tersebut terpenuhi, pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga peningkatan kepuasan secara menyeluruh, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada fasilitas Kesehatan (Wardhani, 2021).

Namun, dalam kenyataannya, masih sering ditemukan adanya ketidakpatuhan administrasi, baik di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Ketidakpatuhan ini dapat meliputi aspek seperti ketidaksesuaian dokumentasi pasien, pengelolaan rekam medis, hingga tidak optimalnya perencanaan operasional rumah sakit. Ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat serta risiko hukum bagi rumah sakit (Kartika, 2019).

Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara rumah sakit swasta dan pemerintah dalam hal pengelolaan administrasi dan sumber daya. Rumah sakit pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM, yang bisa memengaruhi kualitas administrasi. Di sisi lain, rumah sakit swasta, meskipun lebih fleksibel dalam manajemen keuangan, sering kali lebih fokus pada keuntungan bisnis dibandingkan pemenuhan standar pelayanan secara menyeluruh (Wijaya, 2020).

Fakta ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan administrasi rumah sakit terhadap standar pelayanan kesehatan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dan faktor penghambat, solusi yang lebih terarah dapat dirumuskan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memetakan tingkat kepatuhan administrasi rumah sakit swasta dan pemerintah serta mengevaluasi implementasi standar pelayanan kesehatan.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, atau literature review, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tren, teori,

dan temuan-temuan sebelumnya terkait topik yang diteliti, sehingga dapat memberikan landasan teoritis atau konteks bagi penelitian baru (Carnwell & Daly, 2001); (Boote & Beile, 2005). Dalam prosesnya, peneliti membaca dan mengevaluasi isi sumber literatur secara kritis untuk menentukan relevansi dan validitas data yang diperoleh. Metode ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam, memetakan celah penelitian, dan mendukung pengembangan hipotesis atau framework penelitian yang lebih kuat (Cooper, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Tingkat Kepatuhan Administrasi Antara Rumah Sakit Swasta Dan Pemerintah Terhadap Standar Pelayanan Kesehatan

Tingkat kepatuhan administrasi rumah sakit terhadap standar pelayanan kesehatan melibatkan analisis mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana rumah sakit swasta dan pemerintah memenuhi regulasi dan pedoman yang ditetapkan. Rumah sakit swasta sering kali memiliki fleksibilitas lebih dalam menerapkan strategi manajemen yang efisien, mengingat sifat mereka yang profit-oriented. Mereka biasanya memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan reputasi guna menarik lebih banyak pasien, sehingga menciptakan insentif untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan (Hakim, 2021).

Sebaliknya, rumah sakit pemerintah biasanya beroperasi dengan anggaran yang berasal dari dana publik, yang bisa menjadi faktor pembatas dalam implementasi kebijakan atau pembaruan fasilitas. Meskipun begitu, mereka diwajibkan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan sering menjadi titik fokus dalam inisiatif kesehatan masyarakat. Namun, kompleksitas birokrasi di rumah sakit pemerintah seringkali mengakibatkan proses administrasi yang lebih lambat, mempengaruhi respons cepat terhadap perubahan standar atau implementasi prakarsa baru (Amelia, 2019).

Salah satu perbedaan mencolok antara kedua jenis institusi ini adalah struktur pengambilan keputusan. Rumah sakit swasta cenderung memiliki struktur manajemen yang lebih ramping, memungkinkan keputusan dibuat dan diterapkan dengan lebih cepat. Sebaliknya, rumah sakit pemerintah seringkali harus melalui berbagai tingkatan persetujuan, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk realisasi kebijakan baru. Hal ini dapat memengaruhi seberapa cepat standar pelayanan kesehatan baru atau yang diperbarui dapat diterapkan (Wahyuni, 2020).

Sumber daya manusia juga memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan. Rumah sakit swasta, karena ketahanan finansial dan insentif yang lebih tinggi, sering kali mampu menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, mereka dapat lebih mudah menawarkan pelatihan tambahan untuk staf guna mematuhi standar dan prosedur baru. Rumah sakit pemerintah, di sisi lain, mungkin menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan berkualitas karena keterbatasan anggaran dan struktur gaji yang kurang kompetitif (Susilo, 2022).

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran juga memberikan keuntungan bagi rumah sakit swasta. Dengan dana yang lebih mudah diakses untuk investasi dalam teknologi terbaru dan perbaikan fasilitas, rumah sakit swasta dapat lebih dinamis dalam menanggapi dan memperbaiki kelemahan sistem mereka. Rumah sakit pemerintah, meskipun memiliki akses terhadap dana

publik, sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah yang mungkin memprioritaskan area atau isu lain terlebih dahulu (Suryani, 2020).

Krisis kesehatan, seperti pandemi, menguji tingkat kepatuhan administrasi rumah sakit terhadap standar pelayanan. Rumah sakit swasta dengan struktur pengambilan keputusan yang cepat dapat lebih efisien dalam mengadopsi perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat. Di lain pihak, rumah sakit pemerintah berfungsi sebagai tulang punggung dalam merespons krisis kesehatan masyarakat meskipun seringkali menghadapi kendala birokrasi (Harahap, 2018).

Interaksi rumah sakit dengan lembaga sertifikasi dan regulator juga menunjukkan perbedaan. Rumah sakit swasta, untuk membangun brand dan reputasi yang baik, secara proaktif mungkin memilih untuk mengadopsi standar internasional tambahan selain yang diwajibkan oleh regulator dalam negeri. Rumah sakit pemerintah umumnya berfokus untuk mencapai dan mematuhi standar minimum yang ditetapkan, walaupun upaya penambahan standar kualitas juga terus diupayakan (Fakhrizal, 2021).

Kualitas pelayanan pada rumah sakit swasta sering kali menjadi prioritas utama, dan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap standar menjadi bagian integral dari strategi bisnis mereka. Hal ini berbeda dengan rumah sakit pemerintah, yang mungkin lebih fokus pada penanganan volume pasien, mengingat peran mereka dalam melayani masyarakat luas dan kurang beruntung. Hal ini bisa mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap standar pelayanan yang lebih detail dan spesifik (Hidayat, 2020).

Peran manajemen dalam mendorong kepatuhan juga berperan signifikan. Manajemen rumah sakit swasta sering kali diberi kebebasan lebih untuk berinovasi dan merespons permintaan pasien yang berubah-ubah, mengimplementasikan sistem administrasi yang lebih adaptif dan responsif. Sedangkan pada rumah sakit pemerintah, meskipun ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas administrasi, mereka biasanya harus mematuhi kerangka kerja yang ditetapkan oleh departemen kesehatan yang lebih tinggi (Handayani, 2021).

Di banyak negara, rumah sakit swasta juga memiliki keuntungan karena dekat dengan teknologi dan inovasi terbaru dalam perawatan kesehatan. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi kesehatan atau sektor swasta lainnya memungkinkan rumah sakit ini untuk bereksperimen dan mengadopsi teknologi baru yang mendukung kepatuhan terhadap standar pelayanan modern. Rumah sakit pemerintah mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengadopsi teknologi serupa karena prosedur pengadaan yang ketat dan pembatasan anggaran (Nugroho, 2018).

Lebih jauh lagi, aspek pelatihan dan pengembangan staf menjadi kunci dalam kepatuhan administrasi. Rumah sakit swasta seringkali memiliki program pelatihan berkelanjutan yang memastikan tenaga kerja mereka mampu memenuhi dan melampaui standar pelayanan. Rumah sakit pemerintah, walaupun memiliki program pelatihan, bisa jadi menghadapi kendala dalam frekuensi dan kedalaman pelatihan yang diberikan (Kurniawan, 2020).

Rumah sakit pemerintah menghadapi tantangan dalam hal inovasi karena sering kali terikat oleh peraturan dan harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, yang bisa memperlambat adopsi praktik-praktik baru. Di sisi lain, meskipun rumah sakit swasta mungkin memiliki sumber daya lebih, mereka juga menghadapi risiko lain, seperti kebutuhan untuk

menjaga biaya dan efisiensi guna mempertahankan profitabilitas, yang juga dapat memengaruhi kepatuhan mereka (Putri, 2022).

Dengan demikian, evaluasi terhadap tingkat kepatuhan administrasi tidak hanya berkisar pada kemampuan menerapkan standar, tetapi juga pada keberlanjutan upaya yang dilakukan. Kedua tipe rumah sakit terus mengalami tekanan untuk meningkat seiring dengan perkembangan regulasi dan ekspektasi pasien. Baik rumah sakit swasta maupun pemerintah perlu beradaptasi secara berkelanjutan untuk memastikan mereka mematuhi standar dan memberikan pelayanan yang optimal.

Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Kesehatan

Kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kepatuhan ini menyangkut sejauh mana para penyedia layanan kesehatan mengikuti pedoman, prosedur, dan protokol yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kepatuhan yang optimal, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yaitu faktor individu, organisasi, dan lingkungan eksternal (Puspitasari, 2021).

Faktor individu merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan. Pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan adalah salah satu elemen kunci di sini. Tenaga kesehatan yang memahami pentingnya dan bagaimana menerapkan standar kesehatan cenderung lebih patuh. Pelatihan dan pembinaan yang kontinu membantu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengikuti protokol yang ditetapkan (Prasetya, 2019).

Selain pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga kesehatan juga menentukan tingkat kepatuhan. Motivasi intrinsik dan kesadaran etis tentang pentingnya menjaga standar pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan pasien mampu mendorong tenaga kesehatan untuk lebih patuh. Ketika tenaga kesehatan merasa dihargai dan dihormati oleh organisasi tempat mereka bekerja, mereka lebih cenderung menunjukkan kepatuhan yang tinggi (Faizal, 2016).

Faktor organisasi juga memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan. Struktur organisasi yang jelas dan mendukung di mana tanggung jawab dan wewenang didefinisikan dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan. Pemimpin yang menjalankan fungsi manajemennya secara efektif dapat menciptakan budaya kerja yang mendukung kepatuhan terhadap standar (Setyawan, 2018).

Ketersediaan sumber daya juga penting dalam konteks organisasi. Sistem informasi yang efektif, alat dan bahan medis yang memadai, serta fasilitas fisik yang mendukung sangat berpengaruh terhadap kemampuan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar. Jika sumber daya yang diperlukan tidak mencukupi, tenaga kesehatan akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Siregar, 2020).

Kemudian, faktor eksternal atau lingkungan di luar organisasi juga tidak kalah penting. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berperan besar dalam menetapkan kerangka kerja yang perlu diikuti oleh penyedia layanan kesehatan. Pemerintah yang aktif dalam mengawasi dan memberikan bimbingan kepada fasilitas kesehatan secara berkala dapat meningkatkan kepatuhan (Pramono, 2018).

Selain regulasi, faktor eksternal lainnya seperti tekanan dari masyarakat dan harapan pasien juga memainkan peran penting. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pasien yang aktif menyuarakan kebutuhan mereka dapat memaksa penyedia layanan kesehatan untuk mematuhi standar yang ada. Akuntabilitas kepada masyarakat menjadi faktor pendorong kepatuhan yang efektif (Mahendra, 2015).

Keseluruhan faktor ini bekerja secara sinergis untuk memengaruhi kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan. Kesatuan dari pengetahuan dan keterampilan individu, kebijakan dan budaya organisasi, serta regulasi dan harapan masyarakat membentuk sebuah ekosistem yang kompleks. Meningkatkan satu aspek tanpa memperhatikan faktor lain hanya akan menghasilkan perbaikan sementara (Wardhani, 2021).

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan mengambil langkah-langkah terpadu untuk mengatasi hambatan yang ada, diharapkan standar pelayanan kesehatan dapat dijaga dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kepatuhan Administrasi Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah terhadap Standar Pelayanan Kesehatan, secara umum rumah sakit memiliki tingkat kepatuhan yang variatif terhadap standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Rumah sakit pemerintah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam mengimplementasikan regulasi dan standar yang diwajibkan oleh pemerintah karena adanya kontrol yang lebih ketat dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Namun, tetap ditemukan beberapa kekurangan terkait pelaksanaan administrasi yang dapat memengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan.

Sementara itu, rumah sakit swasta menunjukkan fleksibilitas lebih besar terhadap implementasi standar pelayanan kesehatan, namun dalam beberapa kasus ditemukan kurangnya penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Faktor-faktor seperti orientasi bisnis, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, dan kepemimpinan manajemen seringkali menjadi penghambat dalam pencapaian tingkat kepatuhan yang optimal. Meski demikian, beberapa rumah sakit swasta unggulan menunjukkan inovasi di bidang pelayanan kesehatan yang juga selaras dengan standar pemerintah, bahkan melampaui ekspektasi dalam hal pelayanan pasien.

Dengan itu, untuk meningkatkan kepatuhan administrasi pada kedua jenis rumah sakit, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan administrasi, serta kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pihak rumah sakit. Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan dapat tercapai, yang berujung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.

References

Amelia, D. (2019). Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 7(2), 75–89.

- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15.
- Carnwell, R., & Daly, W. (2001). Strategies for the Construction of a Critical Review of the Literature. *Nurse Education in Practice*, 1(2), 57–63.
- Cooper, H. M. (2010). *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach* (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Faizal, R. (2016). *Administrasi Rumah Sakit: Konsep dan Praktik*. Penerbit Salemba Medika.
- Fakhrizal, E. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Rumah Sakit Swasta Berdasarkan Peraturan Regional. *Jurnal Regional Pelayanan Kesehatan*, 17(5), 45–58.
- Hakim, H. (2021). *Panduan Kepatuhan Administrasi Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Nasional*. Penerbit Media Nusantara.
- Handayani, N. (2021). Efektivitas Administrasi Rumah Sakit dalam Mendukung Pemenuhan Standar Pelayanan. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 102–114.
- Harahap, D. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(2), 90–103.
- Hidayat, R.; R., F. (2020). Evaluasi Kinerja Administrasi Rumah Sakit dalam Kepatuhan terhadap ISO Standar Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 91–104.
- Kartika, S. N. (2019). Peran Kebijakan Standar Pelayanan Kesehatan dalam Kepatuhan Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 120–132.
- Kurniawan, A. (2020). Analisis Kepatuhan Rumah Sakit Swasta terhadap Standar Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 63–76.
- Mahendra, A. (2015). *Sistem Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Rumah Sakit*. Deepublish.
- Nugroho, A. (2018). *Manajemen Rekam Medis di Rumah Sakit*. Penerbit Andi.
- Pramono, A. (2018). *Standar Akreditasi Rumah Sakit Berbasis Administrasi Kesehatan*. Penerbit Andi.
- Prasetya, B. (2019). *Administrasi Rumah Sakit: Teori dan Implementasi*. Penerbit Gramedia.
- Puspitasari, I. (2021). *Akreditasi dan Administrasi Rumah Sakit di Indonesia*. Penerbit Bumi Aksara.
- Putri, A. (2022). Analisis Kepatuhan Rumah Sakit Pemerintah terhadap Standar Nasional Pelayanan Medik. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 14(2), 76–89.
- Setyawan, I. (2018). *Tata Kelola Rumah Sakit Swasta di Indonesia*. Pustaka Ilmu.
- Siregar, D. (2020). Studi Kepatuhan Rumah Sakit Pemerintah terhadap Implementasi ISO 9001 dalam Standar Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Kesehatan*, 13(3), 78–92.
- Suryani, E. (2020). Hubungan Kepatuhan Administrasi Rumah Sakit dengan Tingkat Kepuasan Pasien. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 57–71.
- Susilo, A. (2022). Implementasi Administrasi Rumah Sakit dalam Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Kesehatan*, 12(4), 127–141.
- Wahyuni, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Rekam Medis di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 45–63.
- Wardhani, S. (2021). Perbandingan Kepatuhan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta terhadap Akreditasi KARS. *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, 15(1), 45–58.
- Wijaya, H. (2020). Legalitas Rekam Medis dalam Perselisihan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 75–90.